

# KATA PENGANTAR

## Ekonomi Politik Kebijakan Publik?

~ Vedi R. Hadiz ~



Dalam buku singkat tapi padat ini, Sdr. Riant Nugroho telah memberikan telaah yang hampir bersifat ensiklopedis terhadap bidang analisis kebijakan publik. Tinjauannya terhadap berbagai aliran pemikiran dalam bidang kebijakan publik dipaparkan dengan tajam dan dengan kemampuan untuk menangkap esensi dari berbagai pendekatan dengan cukup jernih.

Sdr. Riant menyebutkan pula bagaimana, di dalam pendekatan tertentu, ruang analisis kebijakan publik bertautan dengan ruang yang dihuni oleh analisis politik, bahkan ekonomi-politik. Pemahaman seperti inilah yang ingin saya tekankan secara sangat sederhana dalam pengantar singkat ini sebab bagaimanapun juga, kebijakan yang dirancang untuk publik, untuk umum, tidak bisa diceraikan dari unsur pengaruh kekuasaan.

Dalam sejarahnya, kebijakan publik adalah "domain" yang dikuasai oleh para ahli. Tepatnya, para ahli yang berkompeten sebagai teknokrat atau birokrat dan dipahami sebagai agen

sosial yang merancang kebijaksanaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Kebijakan publik selalu memiliki sasaran yang diutarakan – dan sasaran tersebut biasa disebut "*public good*".

Persoalannya siapakah yang mendefinisikan "*public good*" ini?

Dalam pemahaman yang pada umumnya diajarkan secara formal di berbagai institusi pendidikan "*public policy*", aspek ini kurang dipertanyakan secara kritis sebab, asumsinya, terdapat "*public good*" yang secara objektif dapat diidentifikasi lewat pengetahuan teknokratis yang dimiliki para ahli yang tentunya disertai metodologi yang bersifat ilmiah pula. Semua orang mempunyai akses potensial terhadap pengetahuan dan keterampilan tersebut lewat jalur pendidikan.

Tetapi, di manakah di dunia ini ada kaum ahli yang sekaligus berpengaruh namun bisa membebaskan diri dari tekanan kekuasaan?

Institusi tempat kaum ahli berkantor pun sebenarnya harus diletakkan dalam suatu konstelasi kekuasaan yang spesifik – entah itu badan pemerintahan, "*think-tank*" swasta, atau badan internasional pemberi bantuan pembangunan. Tidakkah kekuasaan – dan oleh karena itu – kepentingan-kepentingan tertentu selalu melekat pada semua institusi macam ini?

Dalam praktiknya, kaum ahli harus selalu "*bergaul*" dengan dunia yang tidak saja bersifat ilmiah-abstrak, tetapi juga

dengan para pemegang kekuasaan konkret, para penyalur dana pembangunan, belum lagi kepentingan elemen masyarakat seperti pengusaha—dan dalam masyarakat yang lebih demokratis—elemen-elemen lain, seperti serikat buruh, gerakan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kalau tidak, para ahli tidak mungkin dapat bekerja, apalagi berpengaruh dalam menentukan sasaran kebijakan. Nah, di antara berbagai “situs” kekuasaan potensial ini, manakah yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap perilaku kaum ahli?

Dengan kata lain—dan sebetulnya ide ini cukup sederhana—kaum ahli dan perancang kebijakan publik tidak hidup dan bekerja dalam suatu “vakuum” sosial-ekonomi-politik. “Ilmu” mereka—dan hasilnya—akan sangat dipengaruhi oleh konteks tempat para ahli itu berada. Belum lagi para ahli tersebut tentu punya kepentingan sendiri. Siapa yang menggaji mereka, mendidik mereka, memberikan mereka kedudukan terhormat dan akses pada kekuasaan itu sendiri? Pada akhirnya, para ahli mempunyai kepentingan dasar untuk dianggap ahli oleh masyarakat luas—yang secara “objektif” dan “ilmiah” mampu mengidentikasi apa yang menjadi “kepentingan bersama”—walaupun hal ini tidak mungkin dilakukan.

Observasi macam inilah yang menjadi pijakan dari apa yang mungkin dapat disebut “ekonomi politik kebijakan publik”. Sifat dasarnya adalah sikap yang kritis terhadap apa yang diklaim sebagai “kepentingan bersama” entah di mana pun,

termasuk di Indonesia. Konsekuensinya adalah keharusan untuk secara sadar selalu mempertanyakan kepentingan macam apa yang memengaruhi suatu kebijakan publik. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Dengan cara seperti ini, kebijakan publik dapat menjadi petunjuk jitu untuk memetakan konstelasi kekuasaan secara lebih luas dalam masyarakat dan negara.

Dengan dasar pijakan semacam ini, saya mengundang Saudara untuk membaca buku Sdr. Riant Nugroho.

Desember 2006

**Vedi R. Hadiz**

**Associate Professor Department of Sociology,  
National University of Singapore**